

RINGKASAN

AIDHIL AKBAR SIREGAR
NIM : 200510264

“Analisis Hukum Terhadap Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 17/Pid.Sus/2023/Pn Ksp)”.
(Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Nuribadah, S.H., M.H)

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat, termasuk meningkatnya kasus kejahatan seperti penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang meresahkan dan sulit diberantas. Kejaksaan memiliki peran dalam penuntutan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh kasus dapat dilihat pada Putusan PN Kuala Simpang Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp, di mana terdakwa terlibat dalam peredaran 53.245 butir ekstasi dan divonis satu tahun penjara karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan akibat hukum terhadap jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia dan internet). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana narkotika Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mempertimbangkan fakta hukum secara didasarkan pada keterlibatan aktif terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika golongan I dalam jumlah besar, yaitu 21,45 gram atau 53.245 butir ekstasi, yang melebihi ambang batas pidana berat sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dilakukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa. Hal ini juga menunjukan bahwa jaksa yang melakukan penyimpangan dalam proses penuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang melakukan Pelanggaran prosedur seperti keterlambatan pengajuan banding mengakibatkan putusan menjadi inkraacht dan merugikan keadilan hukum.

Disarankan agar Kejaksaan secara rutin mengadakan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi jaksa, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika, untuk meningkatkan pemahaman hukum dan teknik penuntutan yang tepat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi internal agar kinerja jaksa lebih profesional.

Kata Kunci : *Hukum, Jaksa, Penuntutan, Narkotika.*

SUMMARY

AIDHIL AKBAR SIREGAR
NIM : 200510264

"Legal Analysis of Prosecutors in the Prosecution of Narcotics Crimes at the Aceh Tamiang District Attorney's Office (Case Study of Kuala Simpang District Court Decision Number 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp)"
(Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Nuribadah, S.H., M.H)

The development of the times and globalization bring both positive and negative impacts to society, including an increase in crimes such as drug abuse. Drug abuse is a serious crime that causes public concern and is difficult to eradicate. The Prosecutor's Office plays a role in prosecuting narcotics crimes based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. A case example can be seen in the Decision of Kuala Simpang District Court Number 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp, where the defendant was involved in distributing 53,245 ecstasy pills and was sentenced to one year imprisonment for failing to report the narcotics crime. This study aims to analyze the legal considerations of prosecutors in prosecuting narcotics crimes at the Aceh Tamiang District Prosecutor's Office and the legal consequences for prosecutors in prosecuting narcotics crimes at the same office.

This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The data used include secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials (books, journals, and articles), and tertiary legal materials (encyclopedias and the internet). Data analysis was conducted descriptively and analytically to produce conclusions.

The results of this study show that in the narcotics crime case with Decision Number 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp, the Public Prosecutor of Aceh Tamiang District Prosecutor's Office comprehensively considered the legal facts in formulating the death penalty demand against the defendant. This consideration was based on the defendant's active involvement in a large-scale narcotics network involving Class I narcotics, amounting to 21.45 grams or 53,245 ecstasy pills, which exceeds the threshold for severe penalties according to Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009. It also shows that prosecutors who commit deviations in the prosecution process of narcotics crimes at the Aceh Tamiang District Prosecutor's Office can be held accountable ethically, administratively, and criminally.

It is recommended that the Prosecutor's Office routinely conduct training and advanced legal education for prosecutors, especially in handling narcotics crimes, to improve legal understanding and proper prosecution techniques, as well as strengthen internal supervision and evaluation mechanisms to enhance prosecutor professionalism.

Keywords: Law, Prosecutor, Prosecution, Narcotics.